

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV



Disusun Oleh :

TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

TAHUN 2023



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN IV

PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Singaraja

Pada Tanggal 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja,
Heriyanti

Koordinator Tim Survey,
I Nengah Karyasa

KATAPENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Singaraja mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Singaraja

2 Januari 2024

Koordinator Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi,

I Nengah Karyasa



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Sasaran Kerja.....	3
1.5 Rencana Kerja.....	3
BAB II METODOLOGI	
2.1 Metode penelitian	5
2.2 Populasi dan Sampel.....	5
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisa.....	5
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5
2.5 Teknik Analisa Data.....	6
2.6 Tahap Pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1 Profil Responden.....	9
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	11
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	16
BAB IV PENUTUP	18
4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Saran	19
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkejlanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey (SISUPER) Pada Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya

1.4. Sasaran Kerja

1. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.5. Rencana Kerja

1.5.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya Penyiapan Bahan

- a) Kelengkapan peralatan survey
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a) Jumlah Responden.

- b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal
 - a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.5.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.5.3 Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu 3 bulan sekali.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melalui aplikasi SI SUPER. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu sepuluh minggu dan dengan jumlah data minimal 110 (seratus sepuluh) responden. Selanjutnya data yang masuk dalam aplikasi SISUPER di ambil data ADK (Arsip data Komputer).

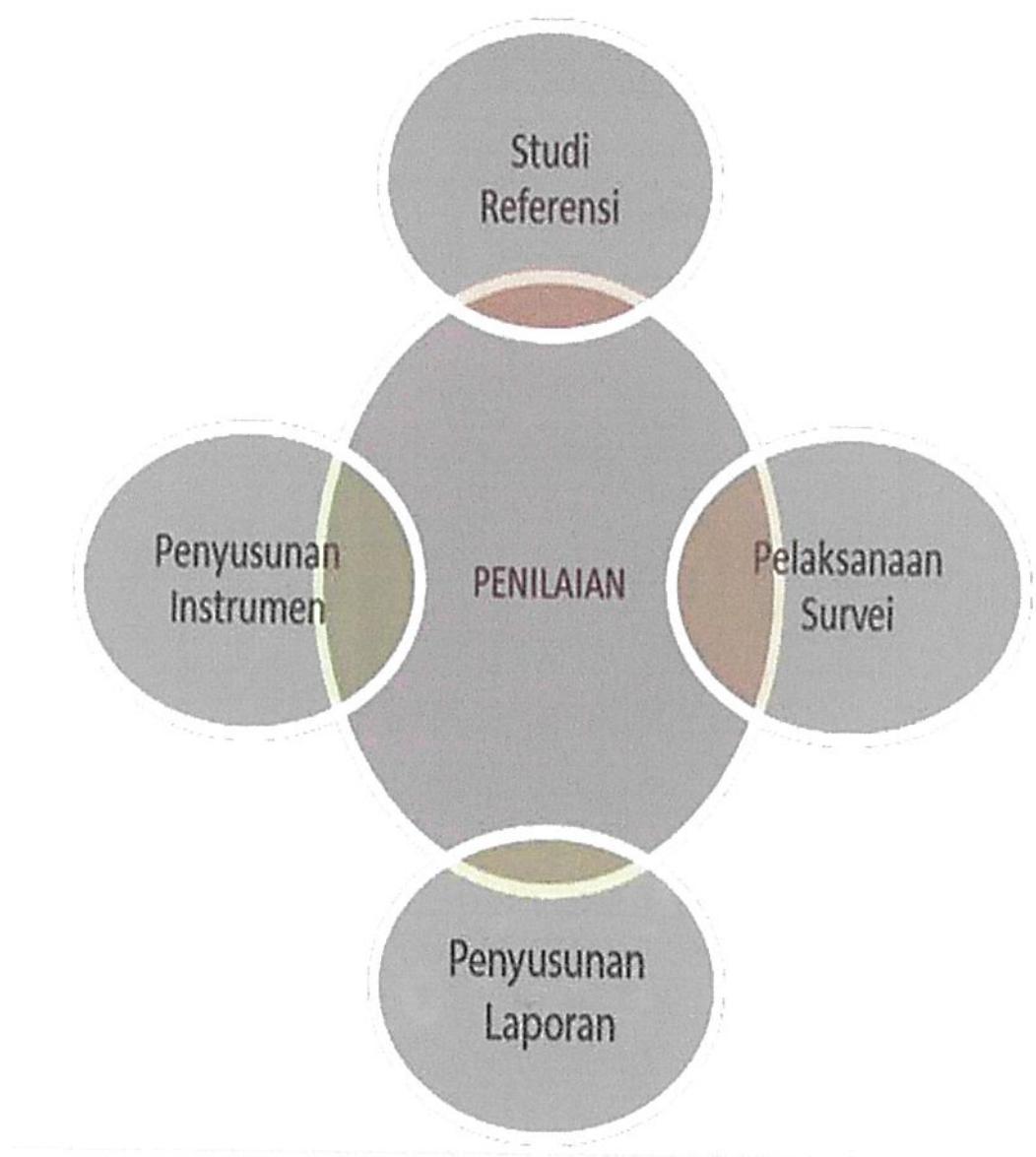
2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, menentukan bobot total dari masing- masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Model Alur Penyusunan Survey IPA menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25 - 43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-62.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51 -81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Umur Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia 29 sampai dengan 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 39 tahun jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 3
Umur Responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	18 Tahun s/d 28 Tahun	20	30,30%
2.	29 Tahun s/d 39 Tahun	34	51,52%
3.	40 Tahun s/d 49 Tahun	8	12,12%
5	50 Tahun s/d 59 Tahun	3	4,55%
6	>59 Tahun	1	1,52%
Jumlah		66	100%

3.1.2 Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan jenis kelamin yaitu Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki.

Tabel 4
Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	42	63,64%
2	Perempuan	24	36,36%
Jumlah		66	100%

3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Singaraja mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Atas serta Strata Satu yang menduduki peringkat kedua.

Tabel 5
Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak sekolah/SD	5	7,58%
2	SMP	3	4,54%
3	SMA	42	63,64%
4	Diploma	4	6,06%
5	S1	12	18,18%
6	S2	0	0,00%
7	S3	0	0,00%
Jumlah		66	100%

3.1.4 Pekerjaan Utama Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 46,97% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pekerjaan lainnya yang berjumlah 31 orang dari total responden 166 orang. Responden yang memiliki pekerjaan lainnya menduduki peringkat kedua.

Tabel 6
Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	0	0,00%
2	TNI/POLRI	4	6,06%
3	Swasta	25	37,88%
4	Wirausaha	5	7,58%
5	Tenaga Kontrak	1	1,51%
6	Pekerja lainnya	31	46,97%
Jumlah		66	100%

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 7
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0,00%	4,000
2	Jarang sesuai prosedur	2	0	0,00%	
3	Sering sesuai prosedur	3	0	0,00%	
4	Selalu sesuai prosedur	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 8
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu meminta imbalan	1	0	0,00%	4,000
2	Sering meminta imbalan	2	0	0,00%	
3	Jarang meminta imbalan	3	0	0,00%	
4	Tidak meminta imbalan	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,970 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 9
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,970
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	2	3,03%	
4	Tidak pernah	4	64	93,94%	
Jumlah			66	100%	

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,985 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,985
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	1	1,52%	
4	Tidak pernah	4	65	98,48%	
Jumlah			66	100%	

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sangat Bersih dan bebas dari Korupsi.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dan bebas dari Korupsi.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	66	100%	
Jumlah			66	100%	

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,955 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 16
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	1	1,52%	3,955
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	65	100%	
Jumlah			66	100%	

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja sebesar 4,00/99,92%

Tabel 17

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

No	Ruang Lingkup	Nilai rata-rata IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	4,000	0,400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
3	Menjual Pengaruh	3,970	0,397
4	Transaksi Biaya	4,000	0,400
5	Biaya Tambahan	3,985	0,398
6	Hadiah	4,000	0,400
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400
10	Transaksi Rahasia	3,955	0,395
Jumlah		39,909	3,991
INDEKS PERSEPSI KORUPSI			3,99 / 99,77%

Dari tabel di atas bahwa Indeks Pengadilan Negeri Singaraja dengan nilai 39,909 jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka interval 3.26-4.00./ Nilai Interval Konversi IPK 81.26-100.00.

Tabel 18
Persepsi Korupsi
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Muatan	Kinerja
1	1.00-1.75	25,00-43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi

NILAI SIPAK DALAM APLIKASI SISUPER

• Pelaporan Elektronik Direktorat SISUPER (SIPAK, SKM, HARJAN) | EIS | Direktorat Jenderal Binaan | Website Resmi Pengadilan Negeri

Indeks Total Data Umur Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden Data Layanan Nilai Per Usur

JUMLAH 66 RESPONDEN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI 42 ORANG

PEREMPUAN 24 ORANG

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NILAI INDEKS

3,99 / 99,77 %

Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah 5 ORG	Diploma 2 0 ORG
SD 0 ORG	Diploma 3 0 ORG	S1 12 ORG
SMP 3 ORG	S2 0 ORG	S3 0 ORG
SMA 42 ORG	Diploma 1 4 ORG	SWASTA 25 ORG
POLRI 4 ORG	TNI 0 ORG	WRAUSAHA 5 ORG
LAINNYA 31 ORG	PEKERJAAN	TEJAGA KONTRAK 1 ORG

Search

01/01/2024 07:04

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Singaraja diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Singaraja memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi tertimbang 3,99 (99,77%) atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,970
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,985
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,955.

Tiga unsur terendah Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks nilai 261 dengan indeks sebesar 3,955.
2. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks nilai 262 dengan indeks 3,970.
3. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 263 dengan indeks 3,985.

Tiga unsur tertinggi Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 264 dengan indeks 4,000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat nilai 264 dengan indeks 4,000.
3. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 264 dengan indeks 4,000.

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja Triwulan IV Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja masuk kategori kinerja **Bersih dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Rahasia memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Maka perlu ditekankan kembali bahwa dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja sangat transparan, tanpa perantara oknum tertentu dan mudah dalam memperoleh informasi mengenai tarif/biaya baik melalui website maupun melalui petugas PTSP. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan persepsi atau anggapan korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Singaraja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. SK PEMBENTUKAN TIM SURVEY**
- 2. PERHITUNGAN INDEKS**
 - NILAI INDEKS
 - DATA RESPONDEN
 - NILAI PER UNSUR



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 44 /KPN/SK. HM-I /I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Singaraja;

b. Bahwa komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

c. Bahwa tujuan diadakannya survei untuk mengukur kcpuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna pengadilan;

d. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah :

- 1) mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
- 2) mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
- 3) mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona

Integritas 2023 Sekaligus Dalam Upaya Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM;

10. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 518/DJU/SK/OT01.3/4/2023 Tentang Pengisian Survey Mandiri Zona Integritas Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

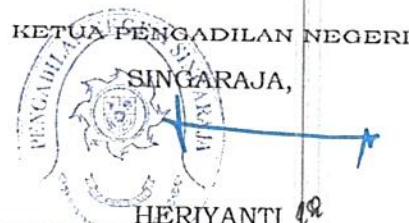
KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Singaraja.

KEDUA : Tim survei secara bertahap menyampaikan kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2024

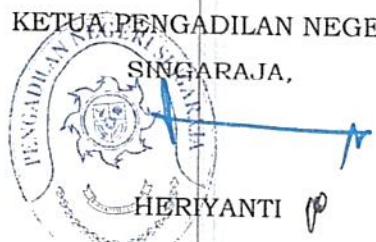


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
 NOMOR : 41 / KPN/SK. HM.1 /I/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	HERIYANTI, S.H., M.HUM. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 198003252002122004	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	I NENGAH KARYASA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197002091993031005	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR
3	I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 19711118 199303 1 003	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4	MADE OKA SARASMIJAYA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 19860515 201101 1 021	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5	KETUT SUMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 19691014 199303 1 004	KA. SUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
6	I MADE SATRYAWAN, S.E. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 19720513 200604 1 003	JURUSITA	ANGGOTA
7	IDA AYU PUTU MARIANI Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 19670328 199403 2 003	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
8	MADE WEDANI, S.E., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 19880910 200912 2 002	JURUSITA	SEKRETARIS
9	DEWA AYU INDAH KRISNAYANTI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 19951229 201903 2 013	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
10	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 19970113 202203 2 010	PENGELOLA PERKARA	ANGGOTA

Ditetapkan di Singaraja
 Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
 SINGARAJA,

 HERIYANTI

Lampiran : Nilai Indeks

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7
	R-099794- IPAK- 9C42035D38 No. HP 087803478529														
10	Rai Adiaksa R-099794- IPAK- AF8D7E6D74 No. HP 081339224012	BANTEN	26 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Desembe 2023
11	I NYOMAN PRAYOGI JANUARTA R-099794- IPAK- 0F1FE6A63D No. HP 85739090707	BALI	31 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Desembe 2023
12	Made Nerti R-099794- IPAK- C8C4576489 No. HP 83117257919	BALI	63 Tahun Perempuan	Tidak / Belum SekolahSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Desembe 2023
13	KETUT MARTA RINI R-099794- IPAK- 924D59FFF4 No. HP 87762352387	BALI	44 Tahun Perempuan	Tidak / Belum SekolahSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Desembe 2023
14	I Putu Mustika Yasa R-099794- IPAK- 702259F48F No. HP 83117257919	BALI	38 Tahun Laki-laki	Tidak / Belum SekolahSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Desembe 2023
15	I Putu Mustika Yasa R-099794- IPAK- 28C17B475D No. HP 83117257919	BALI	38 Tahun Laki-laki	Tidak / Belum SekolahSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6 Desembe 2023
16	Kadek Sari Indah R-099794- IPAK- 8DC48BA83C No. HP 082147382020	BALI	32 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	5 Desembe 2023
17	Nyoman Sadwika R-099794- IPAK- 17B2062875 No. HP	BALI	30 Tahun Laki-laki	Diploma 1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Desembe 2023

No	Nama/Kode Responden	Domicili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	085239988585														
18	I Made Dwi Setiadi R-099794- IPAK- 4001F4F069 No. HP 087860302909	BALI	39 Tahun Laki-laki	SMUWIRAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 Desember 2023
19	Kadek Yogi Arya Agustama R-099794- IPAK- A0164E0E79 No. HP 081999274558	BALI	26 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 November 2023
20	Ketut Agus Susatha R-099794- IPAK- 4435E6026D No. HP 085964272590	BALI	32 Tahun Laki-laki	Diploma 1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 November 2023
21	Kadek Darmiki R-099794- IPAK- 3F3161046F No. HP 085739208232	BALI	36 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 November 2023
22	Kadek Agus Wirya Yasa R-099794- IPAK- 52CE98B9AE No. HP 087701035992	BALI	36 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 November 2023
23	Kadek Yogi Arya Agustama R-099794- IPAK- E411E515F6 No. HP 081999274558	BALI	49 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 November 2023
24	I Gusti Ngurah Bima Prastama R-099794- IPAK- 27DCE6F0AD No. HP 081936214782	BALI	32 Tahun Laki-laki	S1WIRAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 November 2023
25	I DEWA MADE MAHARDIKA PUTRA R-099794- IPAK- 5347328356 No. HP	BALI	38 Tahun Laki-laki	S1WIRAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 November 2023

No	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10										Waktu Rekan
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
26	081266166888 Zita Marlen Hadi R-099794- IPAK- 3BB5A661F1 No. HP 082247555101	BALI	22 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Novemb 2023
27	Randy Ray Sinaga R-099794- IPAK- AB56D1B329 No. HP 087797080011	BALI	22 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Novemb 2023
28	Kadek Teguh R-099794- IPAK- 03B48C1D31 No. HP 088236034508	BALI	35 Tahun Laki-laki	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Novemb 2023
29	DESAK KOMANG RESMI R-099794- IPAK- 2DC0850708 No. HP 82340301937	BALI	41 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	21 Novemb 2023
30	LUH SRI ARDANI R-099794- IPAK- 993DB83120 No. HP 8311828041	BALI	30 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Novemb 2023
31	Koamng Tesning R-099794- IPAK- 34A2C6F7DC No. HP 081945482875	BALI	26 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Novemb 2023
32	NI KOMANG WIDIANINGSIH R-099794- IPAK- BF3D0A1770 No. HP 87761632142	BALI	38 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Novemb 2023
33	NI LUH DEBY RESNASARI R-099794- IPAK- 1927DDE811 No. HP 81339731872	BALI	26 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16 Novemb 2023
34	I Dewa Ketut Gde	BALI	53 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15 Novemb 2023

Nama/Kode Responden		Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Wakt Rekal
	Kertawiguna R-099794- IPAK- 9683F0022B No. HP 085237011111														2023
35	Wayan Adik Santosa R-099794- IPAK- 3E40E3AF32 No. HP 087762614409	BALI	35 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Novemb 2023
36	Ngurah Gede Ambara R-099794- IPAK- 5FE0EB8830 No. HP 087842792526	BALI	39 Tahun Laki-laki	Diploma 1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13 Novemb 2023
37	KOMANG ADI SAPUTRA WIBAWA R-099794- IPAK- 7AA469D444 No. HP 081337071229	BALI	28 Tahun Laki-laki	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9 Novemb 2023
38	Made Buda Artawan R-099794- IPAK- 8D6CE11CA8 No. HP 85938366210	BALI	45 Tahun Laki-laki	SMUTENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Novemb 2023
39	WAYAN ADIK SANTOSA R-099794- IPAK- 705D24E8ED No. HP 087762614409	BALI	40 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Novemb 2023
40	Putu Mas Wiraja R-099794- IPAK- 4ECB07020F No. HP 085738921817	BALI	58 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Novemb 2023
41	UMHAYATI R-099794- IPAK- 5EED0A60A3 No. HP 81238519977	BALI	23 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Novemb 2023
42	KETUT PENI R-099794- IPAK- 03DF658849	BALI	35 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2 Novemb 2023

No.	Nama/Kode Responden	Domicili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Wakt Rekar										
	No. HP 08873735845																								
60	Gede Junaedi Susanto R-099794- IPAK- D4D258AD33 No. HP 081999925188	BALI	36 Tahun Laki-laki	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10 Oktober 2023
61	I Wayan Sridana R-099794- IPAK- 2A81088D87 No. HP 081237794615	BALI	29 Tahun Laki-laki	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Oktober 2023
62	Dewa Ayu Novianti Dewi R-099794- IPAK- 867DCA69D4 No. HP 81337556651	BALI	33 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Oktober 2023
63	Dewa Ketut Wily Asmawan R-099794- IPAK- BBA9E2D17F No. HP 082236635243	BALI	51 Tahun Laki-laki	SMPLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Oktober 2023
64	Made Mawan Dwi Nugraha R-099794- IPAK- 328CA38D58 No. HP 087776456858	BALI	25 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Oktober 2023
65	KADEK AYU BIDRAYANI R-099794- IPAK- D82C0757AB No. HP 85338252185	BALI	38 Tahun Perempuan	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Oktober 2023
66	Ngurah Pradita Putra R-099794- IPAK- 78F8AD8C01 No. HP 082146702413	BALI	43 Tahun Laki-laki	SMUWIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Oktober 2023

Lampiran : Nilai per Unsur